

Manifestasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Prespektif Sosiologi Politik

Muhammad Akbar Hajuan¹, Nanda Maharani Sukma²

Universitas PGRI Mpu Sindok, Nganjuk Indonesia¹, Universitas PGRI Mpu Sindok, Nganjuk, Indonesia²

Corresponding Email: akbar@upms.ac.id

Received : 14-2-2026

Revised : 04-4-2026

Accepted : 10-4-2026



This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).
Published by Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education,
University of Palangka Raya.

Abstrak : Penelitian ini membahas mengenai manifestasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam prespektif sosiologi politik. **Penelitian ini bertujuan** merekonstruksi demokrasi Pancasila sebagai model demokrasi yang memiliki fondasi filosofi, etis, dan institusional yang khas dalam konteks Indonesia. **Metode** yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengkaji dan memahami teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan manifestasi nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam prespektif sosiologi politik. **Hasil pembahasan** dalam penelitian ini adalah mengenai praktik demokrasi yang berakar pada nilai musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial. **Hasil analisis** menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila menempatkan moralitas dan keseimbangan antara kebebasan serta tanggung jawab sosial sebagai prinsip utama. Nilai demokrasi Pancasila tidak bersifat normatif, tetapi juga menawarkan prespektif alternatif yang berakar pada filosofis politik Pancasila sebagai pradigma epistemik yang otonom dan relevan bagi konteks masyarakat multikultural. Selain itu, pentingnya partisipasi masyarakat secara sehat guna keberlangsungan demokrasi yang diselenggarakan dapat menjamin nasib masa depan masyarakat dengan berpedoman pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta menjunjung tinggi nilai toleransi dan keberagaman sosial berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: Manifestasi ; Nilai-nilai Demokrasi Pancasila ; Prespektif Sosiologi Politik

Abstract: This study discusses the manifestation of Pancasila democratic values from a political sociology perspective. This study aims to reconstruct Pancasila democracy as a democratic model that has a unique philosophical, ethical, and institutional foundation in the Indonesian context. The method used in this study is focused on a library research approach, namely a method of collecting data by reviewing and understanding theories from various literatures related to the manifestation of Pancasila democratic values from a political sociology perspective. The results of the discussion in this study are about democratic practices rooted in the values of deliberation, mutual cooperation, and social justice. The results of the analysis show that Pancasila democracy places morality and balance between freedom and social responsibility as the main principles. The values of Pancasila democracy are not normative, but also offer alternative perspectives rooted in the political philosophy of Pancasila as an autonomous and relevant epistemic paradigm for the context of a multicultural society. In addition, the importance of healthy public participation for the sustainability of democracy can guarantee the future fate of society by adhering to just and civilized humanitarian values and upholding the values of tolerance and social diversity based on the values of Pancasila.

Keywords: Manifestation; Values; Democracy Pancasila; Perspective; Sociology Political

A. Pendahuluan

Demokrasi di Indonesia seringkali dipandang hanya melalui kaca mata formalitas institusional, seperti keberhasilan penyelenggaraan pemilu atau pergantian kekuasaan. Namun secara sosiologis demokrasi adalah sebuah proses budaya yang melibatkan negosiasi secara terus menerus antara negara dan masyarakat sipil. Sejak reformasi Indonesia mengalami transformasi besar dari berbagai aspek kehidupan yang berorientasi pada manifestasi nilai kesetaraan, kebebasan dan toleransi yang seringkali berbenturan dengan struktur sosial dan masih kental sifat *patron-client* dan politik identitas.

Demokrasi jika dilihat dari prepektif sosiologi politik merupakan musyawarah mufakat dan sudah melekat pada jati diri bangsa Indonesia. Inilah yang menggaris bawahi bahwa demokrasi bukan hanya sebagai sebuah sistem pemerintahan tetapi sebagai praktik sosial yang hidup di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Artinya demokrasi di Indonesia perlu dipraktikkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Perkembangan demokrasi di negara-negara moderen menunjukkan implementasi demokrasi merupakan representasi dari pemilihan umum. Kohler (1965) mengatakan bahwa di Indonesia konsep demokrasi relevan diterapkan melalui sistem pemilu karena Indonesia merupakan negara pluralisme yang menekankan pada tiga pilar, yaitu kebebasan, persamaan, dan solidaritas. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat memiliki hak dan kekuasaan tertinggi untuk menentukan pemimpin dan kebijakan negara (Dahl, 2019).

Secara universal nilai-nilai demokrasi telah diakui oleh sebagian besar penduduk dunia dan dapat diterima secara logika sebagai suatu kebenaran melalui proses internalisasi dan proses akulturasi kebudayaan lokal Indonesia. Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai lokal tersebut merupakan karakter kepribadian bangsa Indonesia yang mengacu pada pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian bangsa Indonesia memegang teguh konsep Bhinneka Tunggal Ika sebagai kandungan nilai demokrasi.

Sesungguhnya landasan konsep nilai demokrasi Indonesia adalah Pancasila yang secara kontekstual terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 spesifiknya pada sila keempat. Meskipun di Indonesia hidup

dengan tatanan kehidupan yang beragam dan majemuk, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan dalam satu wadah kebangsaan. Sebuah realitas sosial yang tidak bisa dihindari bahwa Indonesia dilihat secara historis dan geografis dibangun diatas fondasi keberagaman.

Keberagaman Indonesia mampu melahirkan solidaritas lintas identitas lokal sehingga memunculkan kosep nasionalisme dalam keberagaman. Dalam kehidupan keberagaman multikultural inilah demokrasi hadir sebagai sistem politik yang ideal karena menjamin kesetaraan hak bagi setiap individu tanpa memandang latar belakang identitas. Sebagaimana diketahui bahwa demokrasi berjalan sesuai dengan kondisi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat (Aryani dkk, 2024).

Warga negara diberikan kesempatan untuk melibatkan diri melalui musyawarah atau memilih pemimpin yang ikut bersaing secara politik untuk mendapatkan suara. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi merupakan sebuah cara penataan lembaga untuk sampai pada keputusan politik, dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara. Namun, dalam proses kompetisi itu harus dibingkai oleh nilai etika normatif yang mengarah pada terjadinya keseimbangan sosial.

Demokrasi terus dikembangkan agar individu lebih aktif menumbuhkan partisipasinya dalam masyarakat. Peran individu atau rakyat lebih di hargai haknya karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat. Demokrasi dalam prespektif sosiologi politik memberikan pemahaman bahwa sumber daya adalah dalam artian individu akan melahirkan aturan yang akan menguntungkan dan melindungi hak-hak mereka.

Ditinjau lebih jauh nilai-nilai demokrasi pancasila menekankan pentingnya demokrasi yang adil dan beradab sehingga mampu mewujudkan aspirasi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan etnis, status sosial, agama maupun gender. Sistem demokrasi harus menjamin kesetaraan substantif bukan hanya formalitas hukum.

Salah satu fenomena yang memerlukan konsep teoritis lebih jauh merupakan praktik demokrasi di Indonesia dengan nilai kolektif yang kuat, pluralitas etnis dan agama, serta institusi politik yang dibentuk oleh ideologi Pancasila. Demokrasi Pancasila telah menjadi konstruksi normatif dalam wacana politik Indonesia sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi (Aspinall, 2010), namun kajian konseptualnya dalam konteks *global political sociology* masih terbatas. Sebagian besar literatur cenderung mendeskripsikan demokrasi Pancasila sebagai bentuk historis-institusional ketimbang sebagai model teoritis yang otonom dan analitis.

Dalam pandangan *sosiologi politik*, demokrasi merupakan fenomena yang mengintegrasikan nilai budaya (*culture*), struktur kelembagaan (*institution*), dan praktik kekuasaan (*power*) di arena politik (Bayart, 2009). Pendekatan ini mempertegas bahwa teori demokrasi tidak semata tentang prosedur formal, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai, identitas kolektif, dan relasi sosial memberi bentuk pada praktik politik (Almond & Verba, 1963). Dari perspektif ini, demokrasi Pancasila seharusnya dipandang bukan sekadar variasi lokal pada demokrasi liberal, tetapi sebagai model teoritis yang memiliki basis filosofis, etis, dan kelembagaan yang unik.

Meski demikian, studi internasional yang secara sistematis merumuskan *democracy with Asian values* atau *alternative democracies* umumnya terfragmentasi dan sering kali

terjebak pada dikotomi relativisme budaya (Diamond, 1999). Upaya-upaya tersebut belum benar-benar menghasilkan kerangka analitis yang mampu menjembatani nilai-nilai budaya politik dengan indikator operasional demokrasi yang dapat diuji secara empiris dalam konteks non-Barat. Demokrasi Pancasila sebagai model demokrasi deliberatif-komunitarian yang berakar pada nilai musyawarah, gotong royong, keadilan sosial, dan moralitas publik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena manifestasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam perspektif sosiologi politik kontemporer. Data diperoleh melalui analisis pada masalah prinsip-prinsip dasar demokrasi Pancasila sebagai kerangka evaluatif terhadap praktik demokrasi kontemporer. Dalam hal ini, penelitian tidak bersifat deskriptif-positivistik, tetapi mengembangkan standar nilai yang dapat digunakan untuk menilai kesesuaian antara praktik politik dan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini memanfaatkan studi literatur akademik, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen, guna memperkuat pemahaman teoritis dan memberikan gagasan analisis yang komprehensif (Creswell, 2015).

C. Hasil Dan Pembahasan

a. Hasil

Sosiologi politik memberikan manifestasi demokrasi di Indonesia menunjukkan idealisme yang unik. Secara prosedural Indonesia dianggap sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Namun secara substansi nilai keadilan sosial dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan besar di abad 21 dari kekuatan oligarki.

Nilai demokrasi dimanifestasikan dalam bentuk gotong royong politik dan kemunculan komunitas secara kolektif. Tujuan demokrasi bukan hanya sebuah kebutuhan tambahan, melainkan fondasi esensial dalam menjaga keberlanjutan demokrasi yang sehat, adil, dan inklusif (Amanda dkk, 2025). Berikut adalah tabel dinamika manifestasi nilai demokrasi.

Tabel 1. Manifestasi nilai Pancasila dalam perspektif sosiologi politik

Dimensi	Manifestasi Nilai-Nilai Demokrasi	Tantangan Sosiologi Politik
Kebebasan	Menjamurnya media sosial sebagai ruang publik baru.	Polarisasi digital dan hoaks
Kesetaraan	Meningkatnya representasi kelompok minoritas dan perempuan	Budaya patriarki dan politik dinasti
Toleransi	Konsensus Pancasila sebagai titik temu perbedaan	Radikalisme dan eksekusi sosial

Sumber: diolah oleh penulis

Fenomena diatas menunjukkan secara empiris bahwa perspektif sosiologi politik demokrasi Pancasila sangat erat kaitannya dengan dinamika politik Indonesia yang terkadang dianggap tidak konsisten terhadap proses demokrasi modern sehingga menciptakan cara pandang masyarakat yang kurang stabil dalam memandang bahwa

penerapan nilai dan norma hukum tidak bekerja dengan baik sebagai entitas netral yang berdiri sendiri melainkan menjadi kekuatan elite sehingga dapat mempengaruhi demokrasi.

b. Pembahasan

1. Sosiologi Politik dan Nilai Demokrasi Pancasila

Secara etimologis sosiologi dan politik terbagi menjadi dua pemaknaan, apabila sosiologi membahas tentang masyarakat secara umum dan luas, maka politik membahas tentang kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh lembaga pemerintah maupun sosial yang berpengaruh terhadap pemerintah. Comte (1858) mengatakan bahwa kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan kata yang digabungkan, pertama kata *socio* berasal dari bahasa Latin yang artinya masyarakat, dan bahasa Yunani *logis* yang artinya ilmu. Sehingga secara terminologi sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang sistem hubungan individu dan masyarakat.

Pancasila sebagai sistem sosial dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, terdiri dari masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal di Indonesia dalam bentuk pandangan hidup atau cara hidup yang terintegrasi dalam agama, adat, dan budaya berbagai suku bangsa. Kelompok kedua, meliputi masyarakat ilmiah-akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan pendekatan yang bersifat akademis kelompok pertama melihat sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam konteks pandangan hidup atau kearifan lokal, yang menunjukkan bahwa unsur-unsur filosofis Pancasila berfungsi sebagai pedoman praktis dalam berbagai aspek kehidupan.

Contohnya dalam hal agama, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius, karena perkembangan kepercayaan di masyarakat yang meliputi animisme, dinamisme, politeisme, hingga mono. Menurut Notonagoro, (1975) Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa sila-sila Pancasila saling terkait dan berhubungan secara koheren. Notonagoro (1975) menggambarkan kesatuan dan hubungan antar sila Pancasila dalam bentuk hubungan hierarkis piramidal serta kesatuan yang saling mengisi atau mengkualifikasi satu sama lain (Semadi 2019).

Dari pendapat di atas dapat dianalisis bahwa sosiologi politik memandang demokrasi Pancasila sebagai fenomena sosial yang harus didukung serta diperkuat oleh sistem politik sehingga demokrasi benar-benar berjalan dan bekerja sesuai dengan konteks kebutuhan sosial. Sosiologi politik dipahami sebagai seperangkat norma sosial yang mengatur antara struktur kekuasaan dan kepentingan politik serta nilai-nilai hidup yang ada di masyarakat (Abbas, & Hajairin, 2026) Sosiologi politik sebagai wadah pertarungan dan perebutan kekuasaan dengan menentukan masa depan demokrasi.

Pengaruh sosiologi politik terhadap sistem nilai di Indonesia menjadi urgensi bagi masyarakat karena sistem nilai tersebut menjadi instrumen pengendalian kekuasaan. Arah

kebijakan pemerintahan Indonesia secara normatif perwakilan rakyat sebut saja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk undang-undang yang mengatur secara sistematis melalui mekanisme konstitusional yang menekankan prinsip demokrasi, partisipasi publik, dan keterbukaan.

Isu pemilihan kepala daerah menguat kembali bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini tentu saja merupakan sinyal kemunduran bagi sebuah negara dengan sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam kepentingan elite politik baik ditingkat legislatif maupun eksekutif sebagai pembuat kemunduran demokrasi di Indonesia. Dari sudut pandang sosiologi pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) dianggap sebagai pemborosan biaya. Karena pemilihan kepala daerah membutuhkan biaya yang tinggi dan dihindangi oleh banyaknya praktik politik uang.

2. Budaya Politik dan Prinsip Demokrasi Pancasila

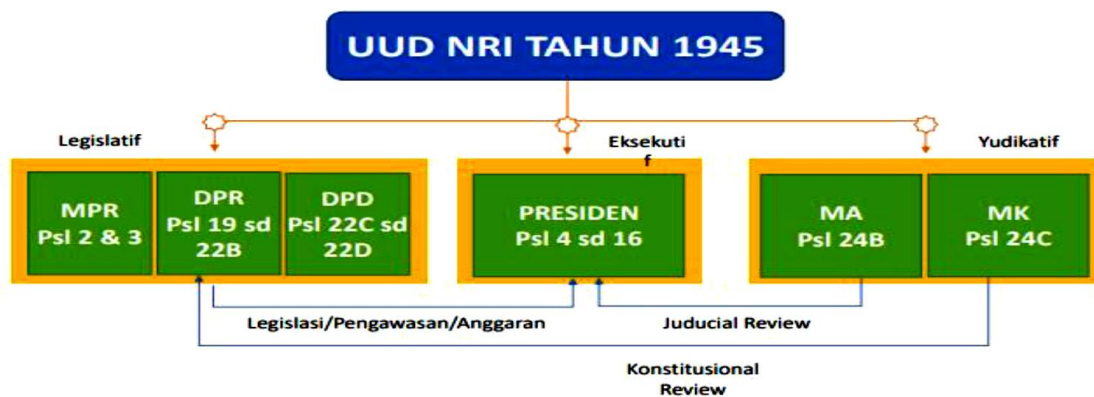
Perkembangan politik di Indonesia bagian dari kebudayaan masyarakat Indonesia dengan ciri-ciri yang lebih khas. Almond dan Verba (1984) mendefinisikan budaya politik suatu sikap warga negara yang khas terhadap sistem politik dan keanekaragaman masyarakat serta sikap terhadap peranan warga negara yang ada didalam suatu sistem. Sosiologi politik memandang bahwa budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara penyelenggaranya dari aspek hukum, adat, istiadat, dan norma kebiasaan yang di hayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya.

Budaya politik juga diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif. Budaya politik partisipan ditandai dengan kesadaran politik yang tinggi. Budaya politik di Indonesia merupakan perwujudan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan politik kenegaraan (Hans Kelsen, 1973). Indonesia menjalankan sistem pemerintahan presidensial multi partai yang demokratis. Sistem politik Indonesia didasarkan pada Trias Politik yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Kekuasaan negara dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan yaitu DPR yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil partai politik dan DPRD yang anggota-anggotanya mewakili provinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerah diwakili oleh empat orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing. MPR dulunya lembaga tertinggi negara, namun setelah amandemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi negara. Keanggotaan MPR berubah setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 pada periode 1999-2004.

Seluruh anggota MPR adalah anggota DPR ditambah dengan anggota DPD. Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Anggota MPR terdiri dari 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD. Lembaga eksekutif berpusat pada presiden dan kabinet. Kabinet di Indoensia adalah kabinet

presidensial yang diberi nama oleh Presiden Prabowo Subianto adalah Kabinet Merah Putih. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada diparlemen. Kemudian lembaga yudikatif Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan diawasi oleh Komisi Yudisial.



Prinsip checks and balances

Gambar 1. Integrasi struktur pemerintahan yang berfungsi sesuai dengan UUD 1945. Sumber, Kajian Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia, 2023).

Ditengah transformasi sosial dan digitalisasi sistem politik di Indonesia mewujudkan bentuk demokrasi yang berbeda dengan negara lain yaitu demokrasi Pancasila dengan prinsip *checks and balance* (*pengawasan dan keseimbangan*). Sistem ini tidak hanya bertumpu pada aspek teknis seperti penyelenggaraan pemilu, partisipasi politik, atau mekanisme perwakilan, tetapi juga menekankan nilai-nilai etis dan budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, seperti musyawarah, gotong royong, serta orientasi pada kepentingan kolektif (Udiyo, 2020).

Masyarakat dan elite politik saling mengawasi dan membatasi untuk mencegah kesewenang-wenangan, penyalahgunaan wewenang, dan membatasi kekuasaan eksekutif agar tidak terlalu dominan. Sistem ini memastikan tidak ada lembaga yang absolut dalam menciptakan keseimbangan wewenang dan menjaga demokrasi. Artinya demokrasi Indonesia memiliki karakter yang khas dalam menjaga kestabilan politik yang menjamin hak warga negara dan tanggung jawab sosial. Negara ideal hanya bisa diwujudkan dengan demokrasi.

Nilai-nilai demokrasi pada dasarnya terkait dengan kebebasan individu dan partisipasi. Pelaksanaan hak-hak liberal, sipil dan politik adalah bagian dari kehidupan yang menyangkut individu sebagai makhluk sosial. Menurut Ramadhanti (2022) demokrasi dan pemilu di Indonesia dalam tinjauan sosiologi politik yaitu merupakan pandangan hidup

yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Indonesia dengan fondasi ideologi Pancasila mempengaruhi kehidupan warga negaranya. Demikian pula dengan kenyataan bahwa Pancasila sebagai garis filosofis negara Indonesia merupakan dasar dan acuan bagi pembentukan negara dan pelaksanaan lembaga-lembaga demokrasi (Putri dkk, 2023).

Hubungan antara demokrasi, Pancasila, dan sosiologi politik bersifat integratif serta saling melengkapi sehingga menjadi keseimbangan. Sebagai ideologi dan sekaligus fondasi bangsa, Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat dengan hak dan kewajiban yang seimbang. Arfa, & Ferdian, (2024) mengatakan bahwa keadilan politik merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi modern yang mencerminkan kualitas kesetaraan, partisipasi, dan representasi publik. Hal tersebut tercermin dalam sila kedua yang menjelaskan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima yang menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Kesimpulan dan Implikasi

Nilai-nilai demokrasi Pancasila memberikan kerangka etis untuk menjalankan demokrasi substantif, bukan sekedar demokrasi prosedural. Demokrasi Pancasila tidak hanya menekankan pada pemilu dan partisipasi politik, tetapi juga menjunjung nilai-nilai musyawarah, tanggung jawab kolektif, dan penghormatan terhadap keberagaman dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika. Nilai demokrasi Pancasila dapat menjadi prinsip bernegara yang memastikan bahwa praktik demokrasi tidak bertentangan dengan nilai etika dan prinsip keadilan, karena nilai Pancasila dapat memperkuat prinsip kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi landasan moral bagi pembentukan kebijakan sosial politik, hukum, yang berasas pada nilai kemanusiaan.

Kajian literatur menunjukkan bahwa Pancasila memiliki keselarasan dengan prinsip dasar kemanusiaan yang adil dan beradab serta berperan sebagai dasar etika dalam membentuk karakter masyarakat yang demokratis. Hans Nawiasky menempatkan Pancasila sebagai norma fundamental negara (*Staats fundamental norm*) yang merupakan norma hukum tertinggi, selanjutnya pada kelompok jenjang lebih rendah yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta Hukum Dasar tidak tertulis atau disebut juga konvensi ketatanegaraan sebagai aturan dasar negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*). Hasil kajian diatas menunjukkan bahwa manifestasi nilai-nilai demokrasi Pancasila menempatkan keberagaman harmoni sosial, kolektivitas, dan persatuan sebagai prioritas masa depan bangsa dan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada sehingga perwujudan nilai demokrasi Pancasila relevan untuk mewujudkan kesejahteraan semua warga negara melalui musyawarah sesuai dengan kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan suku, agama, ras, atau status sosial.

Daftar Pustaka

- Abbas, & Hajairin. (2026). Sosiologi Hukum Dan Politik: Studi Tentang Pengaruh Politik Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 4090-4101. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3803>
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Amanda, T., & Hapri Novriza Setya Dhewantoro. (2025). Pendidikan Politik sebagai Fondasi Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Multikultural. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 5(1), 7-14. Retrieved from <https://jurnal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/471>
- Arfa, M., & Ferdian. (2024). Keadilan Politik dalam Demokrasi Modern: Menakar Kesetaraan, Partisipasi, dan Representasi Publik. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(6), 302-308. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i6.1631>
- Aryani, N. P., Azhary Fathama, Ahmad Solehudin, & Hana Mifta Rofina Thenu. (2024). Perbandingan Konsep Demokrasi Dalam Teori Perkembangan Filsafat Dengan Relevansi Menjelang Pemilu 2024. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01). Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/514>
- Almond G., & Verba, S. 1984. *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Aspinall, E. (2010). The irony of success. *Journal of Democracy*, 21(2), 20-34. <https://doi.org/10.1353/jod.0.0157>
- Bayart, J.-F. (2009). *The State in Africa: The Politics of the Belly* (2nd ed.). Cambridge: Polity Press.
- Comte, Auguste., *The Positive Philosophy: freely translated and condensed by Harriet Martineau*. New York: Calvin Blanchard, 1858.
- Dahl, R.A. (2019). *Demokrasi dan Teori Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. In *Mycological Research* 94 (4).
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Hans Kelsen, 1973 . *General Thory Law and State, Translited by Andres Wedberg, Russll & Russell*, New York.
- Kohler, H. (1965). *Principles of Democracy. Germany: Klett Publication*.
- Lasswell, H, D. & Kaplan, A. 1970. *PowerandSociety*. New Haven: Yale University Press. Dalam Effendi.Onong Uchjana 2004
- Notonagoro. (1975). *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Putri Oktaviani Yulias, Apriliana, & Siti Tiara Maulia. (2023). Demokrasi Dalam Dimensi Nilai-Nilai Pancasila Berdasarkan Paradigma Philosophische Grondslag. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(3), 110-120. <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i1.297>
- Ramadhanti, D. N. (2022). Demokrasi dan Pemilu Indonesia dalam Tinjauan Sosiologi Politik. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 361-366. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1677>
- Udiyo B. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>
- Semadi, Y. P. (2019). Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(2), 82-89. <https://doi.org/10.23887/jfi.v2i2.21286>.
https://mpr.go.id/img/jurnal/file/100624_Final%20Kajian%20MPR%20Demokrasi